

REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMISKINAN

Kota Yogya Perkuat Kapasitas SDM

YOGYA (KR) - Akhir Oktober lalu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) meluncurkan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan. Pemkot Yogya merespons kebijakan tersebut dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPS-DM) Kota Yogya Dedi Budiono, mengatakan Kota Yogya menjadi salah satu pemerintah daerah yang menjadi percontohan dalam menjalankan reformasi birokrasi tematik tersebut.

"Tentu kami apresiasi penanganannya yang dilakukan oleh KemenPAN RB itu. Sehingga sesegera mungkin kapasitas SDM di Kota Yogya untuk diperkuat agar mampu menerapkan kebijakan dengan baik," katanya di sela



KR-Ardhi Wahdan

Pelatihan untuk penguatan kapasitas SDM reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.

pelatihan yang digelar di Balai Kesejahteraan Sosial Jalan Veteran, Senin (7/11).

Pelatihan tersebut akan digelar hingga 11 November 2022 mendatang dan diikuti oleh 50 ASN di lingkungan Pemkot Yogya. Peserta pelatihan merupakan ASN yang berada di instansi ter-

kait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Terutama yang berada di bidang teknis, perencanaan serta informasi teknologi.

Dedi menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)

Yogyakarta yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu harapannya sebagai salah satu daerah percontohan, Kota Yogya mampu menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan

kemiskinan, mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak. "Tiap tahun angka kemiskinan harus bisa ditekan. Sehingga SDM yang mengampuni bidang tersebut dituntut memiliki kemampuan yang kompeten," imbuhnya.

Oleh karena itu, setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan memahami kebijakan reformasi birokrasi tematik, pendekatan dan strategi penanggulangan kemiskinan serta mampu melaksanakan rencana aksi melalui penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan peningkatan tata kelola program yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ketua Panitia Pristi Yudawati, memaparkan selama pelatihan pihaknya melibatkan sejumlah fasilitator dari berbagai kalangan. Di antaranya KemenPAN RB, Kementerian

Sosial, UGM, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DIY, Pemkab Banyuwangi selaku

pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan OPD teknis lain. (Dhi)-d

KALI BELIK JADI LANGGANAN BANJIR TIAP MUSIM HUJAN

Penanganan Luapan Air Butuh Koordinasi Lintas Sektor

YOGYA (KR) - Kali Belik khususnya yang berada di wilayah Iromedan Gondokusuman selalu menjadi langganan banjir ketika intensitas hujan tinggi. Penanganan luapan air di kawasan tersebut pun membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Nur Hidayat, mengungkapkan jajarannya tidak bisa melakukan proses penanganan sendiri. "Dari muara itu kan dulu ada dua, yang satu di Sleman tapi sudah buntu dan tinggal ke Kali Belik. Makanya kalau kapasitas air banyak, pasti meluap karena tidak mampu menampung. Ini sedang kami ko-

ordinasikan juga dengan provinsi kaitannya dengan kapasitas itu," jelasnya, Senin (7/11).

Selain dengan DIY, koordinasi juga perlu dibangun bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Hal ini karena instansi tersebut memiliki kewenangan penuh terhadap penanganan sungai. Pihaknya selaku pengampu di wilayah sebenarnya hanya berwenang mengenai penanganan dampak serta pemukiman di kawasan tersebut.

Banjir atau luapan air di Kali Belik hampir setiap tahun selalu terjadi. Kejadian tersebut mengakibatkan permukiman khususnya di wilayah Iromedan terendam air. Ketinggiannya pun

bervariasi, bahkan bisa mencapai satu meter. Teranyar, luapan air yang tergolong cukup besar terjadi pada Minggu (6/11) sore lalu. "Memang selalu seperti itu. Langkah antisipasi sekarang ini ialah kewaspadaan masyarakat ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi," imbuhnya.

Nur Hidayat pun berharap ada langkah strategis dari lintas sektor untuk penanganan jangka panjang. Hal ini agar masyarakat yang tinggal di kawasan Iromedan mampu merasa aman dan nyaman. Apalagi kejadian tersebut hampir selalu berulang setiap tahun.

Koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan karena kewenangan

kota cukup terbatas. Terlebih pasokan air yang masuk ke Kali Belik disumbang dari daerah lain. Selain itu ada instansi lain yang memiliki kewenangan khusus terkait penataan sungai.

Sebelumnya, penanganan kapasitas air yang masuk ke Kali Belik sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya dengan membuat sistem drainase di kawasan Jalan Colombo yang dialirkan ke Kali Gajah Wong. Harapannya hal itu bisa mengurangi debit air yang masuk ke Kali Belik. Selain itu, BBWSO juga telah membangun Embung Langensari yang kawasan itu dulunya digunakan sebagai tempat pendidikan. (Dhi)-d

PENGUMUMAN (Tentang Sertifikat Hilang) No: 17267/Peng-33.01.HP.03.02/X/2022					
Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:					
No	a. Nama Pemohon b. Alamat	a. Jenis Hak b. No. Hak c. Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Desa / Kel. b. Kecamatan
1	a. ASRORI b. Jl. Jerukmanis RT. 004 RW. 001 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 509 c. 838 m ²	ASRORI	07/09/2004	a. Kedawung b. Kroya
2	a. RUBIARSIH b. Taman Patra Indah Blok.E.1 No.5 RT. 005 RW. 020 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap.	a. Hak Bangunan b. 846 c. 60 m ²	RUBIARSIH	12/12/1996	a. Sidanegara b. Cilacap Tengah
3	a. ISNAENI NOPRIHATIN b. Jl. Diponegoro No 310 RT. 006 RW. 004 Desa Sindangari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 5003 c. 529 m ²	ISNAENI NOPRIHATIN	23/04/2010	a. Cilampung b. Cimanggung
4	a. TSEN FAN LIEN b. Jl. Diponegoro No 310 RT. 006 RW. 004 Desa Sindangari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 630 c. 630 m ²	TSEN FAN LIEN	23/02/2005	a. Cilampung b. Cimanggung
5	a. TSEN FAN LIEN b. Jl. Diponegoro No 310 RT. 006 RW. 004 Desa Sindangari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 636 c. 336 m ²	TSEN FAN LIEN	23/02/2005	a. Cilampung b. Cimanggung
6	a. ACHMAD SOLICHUDIN (Untuk dan atas nama ahli waris dan kuasa dari ahli waris yang lain) b. Dusun Tinggarjati RT. 006 RW. 001 Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 79 c. 626 m ²	ASMUNGI	16/08/1975	a. Gentasari b. Kroya
7	a. PRIYATNO (Selaku pembeli tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 73/ Kedawung) b. Jl. Jerukmanis RT. 03 RW.02 Desa Kedawung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 73 c. 5724 m ²	CHOTIJAH SAIKUN	28/04/1987	a. Kedawung b. Kroya
8	a. SARTINI (Selaku pembeli tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 329/ Karangtulan) b. Jl. Keramik RT. 002 RW. 007 Kelurahan Karangtulan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 329 c. 854 m ²	RUDI HASTOPO	22/03/1999	a. Karangtulan b. Cilacap Utara
9	a. SAMIRAH b. Perumahan RT.001 RW.008 Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 620 c. 3776 m ²	SAMIRAH	22/01/2002	a. Kutawaru b. Cilacap Tengah
10	a. PRIYONO b. Jl. Raya Pahonjean No 74 RT. 006 RW. 001 Desa Cibueying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 249 c. 1678 m ²	PRYONO	10/05/2016	a. Bener b. Majenang
11	a. JINAH b. Jl. Raya Pahonjean No 74 RT. 006 RW. 001 Desa Cibueying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 249 c. 1678 m ²	JINAH	10/05/2016	a. Bener b. Majenang
12	a. SITI FATIMAH b. Perum Rinenggo Asri Blok.B.3 No. 23 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 910 c. 561 m ²	MUSLICHUDIN	20/07/1998	a. Mertasinga b. Cilacap Utara
13	a. SUDYONO, SE b. RT.01 RW.01 Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 1155 c. 300 m ²	SUDARNO	29/12/1999	a. Maos Kidul b. Maos
14	a. WIDI SUSANTI b. Jl. Kebonjati RT. 005 RW. 007 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.	a. Milik b. 368 c. 121 m ²	WIDI SUSANTI	30/04/2002	a. Cilacap b. Cilacap Selatan

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.
Cilacap, 27 Oktober 2022
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Ttd
KARSONO, A.Ptuh, S.H., M.Si
NIP. 19681028 198903 1 004



KOMISI D KAWAL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Seluruh Fase Kehidupan Warga Kota Harus Terlindungi

YOGYA (KR) - Bidang kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD Kota Yogyakarta yang menjadi mitra eksekutif sepanjang tahun ini telah berupaya optimal untuk mengawal hal tersebut. Harapannya seluruh fase kehidupan warga kota mampu terlindungi. Baik sejak dalam kandungan, bayi, anak, remaja, dewasa, orangtua, lansia hingga meninggal dunia.

Komisi D sebagai salah satu alat kelengkapan dewan di DPRD Kota Yogyakarta ditugaskan secara khusus di bidang kesejahteraan rakyat. Terdapat sepuluh mitra kerja Komisi D yang membawahi kegiatan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olahraga dan lain sebagainya. Komisi tersebut saat ini dipimpin oleh tiga orang wakil rakyat yakni Suryani SE MSi sebagai ketua, Krisnadi Setyawan sebagai wakil ketua, dan M Ali

Fahmi SE MM sebagai sekretaris.

Kegiatan yang diampu oleh mitra kerja Komisi D satu sama lain saling berkaitan. Seperti untuk melindungi bayi yang lahir dengan sehat, tidak bisa dilepaskan dari intervensi terhadap remaja putri dan ibu hamil. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar mewujudkan zero stunting. Sehingga remaja putri yang akan menjadi calon ibu pun harus mampu menjaga kesehatan dengan baik. "Makanya kami juga mendukung kegiatan gerakan aksi bergizi yang menyasar remaja putri dengan memberikan obat penambah darah. Jangan sampai remaja putri mengalami anemia, di mana mereka itu kan banyak yang menyukai makanan cepat saji," urai Suryani.

Begitu pula bagi ibu hamil atau pasangan suami istri baru, harus memiliki pemahaman dan kesadaran dalam menyiapkan buah hatinya. Edukasi bagi kelu-



Suryani SE MSi



Krisnadi Setyawan



M Ali Fahmi SE MM.

arga baru serta pemantauan kondisi kehamilan harus rutin dilakukan. Kader kesehatan yang ada di wilayah memegang peran penting terkait hal tersebut. Kota Yogyakarta pun telah memiliki perda terkait ASI eksklusif untuk menjaga asupan bayi yang dilahirkan.

Di samping itu, perkembangan anak tidak bisa disepelekan. Sebagai calon generasi penerus, anak merupakan aset yang paling berharga bagi bangsa.

Beruntung Kota Yogyakarta telah meraih predikat kota ramah anak serta Kota Layak Anak (KLA) untuk kategori utama. Hanya, saat ini masih harus bekerja keras agar mampu meraih kategori paripurna atau KLA yang sesungguhnya. Dengan begitu, perlindungan anak tidak sekadar menjadi kegiatan di tingkat organisasi perangkat daerah melainkan benar-benar terimplementasi hingga kelembagaan di masyarakat.

"Kemarin kami kawal betul tim eksekutif dalam menyusun grand desain KLA paripurna. Ada beberapa masukan seperti perda kawasan tanpa rokok yang perlu digencarkan. Paling tidak di tempat-tempat umum harus tersedia ruang khusus merokok supaya orang yang merokok tidak mengganggu hak orang yang tidak merokok. Begitu pula reklame rokok serta sponsor produk rokok harus ada penataan padahal itu berkaitan juga de-

ngan pendapatan asli daerah. Memang tidak mudah, namun harus diwujudkan," paparnya.

Kiprah Komisi D dalam perwujudan perlindungan khusus bagi anak juga mendapatkan respons bagus. Terutama perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, narkoba, trafficking, HIV AIDS dan lainnya. Salah satu bentuk perlindungan itu ialah tersedianya rumah aman bagi korban maupun pelaku. Lahan dan bangunan telah tersedia dan tinggal rehabilitasi yang disesuaikan dengan aturan dari kementerian terkait.

Begitu pula persoalan kenakalan remaja yang sempat menjadi persoalan di Kota Yogyakarta. Komisi D menelurkan perda terkait ketahanan keluarga yang kini telah berlaku. Dalam waktu dekat akan disahkan pula perda terkait kepemudaan yang sekarang masih dalam proses evaluasi oleh gubernur. Keberadaan produk hukum tersebut har-

panya mampu menjadi pijakan eksekutif dalam mengambil kebijakan.

Sedangkan perlindungan bagi orangtua maupun lansia salah satunya dorongan agar seluruh pemangku wilayah terlindungi oleh jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Namun realisasinya masih menunggu proses kajian karena payung hukum dari pusat belum tersedia. Dengan adanya jaminan sosial maka perangkat wilayah bisa lebih produktif dalam mengayomi warga serta menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan hak masyarakat.

Sementara bagi penduduk yang meninggal dunia, selama ini telah digulirkan jaminan kematian. Terutama bagi anggota keluarga yang masuk dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk meringankan beban biaya pemakaman. (Dhi)-d



KR-Ardhi Wahdan

Rapat kerja Komisi D bersama mitra di eksekutif.



KR-Ardhi Wahdan

Pantauan Komisi D terhadap proses penerimaan peserta didik baru.



KR-Ardhi Wahdan

Komisi D menerima audiensi dari salah satu organisasi olahraga.